

POLA REKRUTMEN POLITIK PADA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Chaikal Nugra

NPP. 30.1571

Asdaf Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Prodi Politik Indonesia Terapan

Email: 30.1571@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Margaretha Rumbekwan. S.Sos, M. Si.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Indonesia is a democratic country and has a political idea related to public participation, namely voting. People have the right and obligation to vote according to their wishes and will to elect leaders and determine their representatives in legislative elections. **Purpose:** This study aims to determine the political recruitment process of the Mamuju Regency Democratic Party Branch Leadership Council in the selection of board members and party cadres, and to find out what factors are the basis for determining political recruitment. **Method:** The type of research used by the author is qualitative research with descriptive methods through an inductive approach. The author uses primary data and secondary data to obtain research data. Primary data are sourced from interviews conducted with informants, while secondary data are sourced from KPU regulation Chapter V concerning Membership and Political Education of parties Article 15, namely the regeneration system. Data collection using interview techniques, qualitative observation, and documentation. **Results:** The results showed that 1) The recruitment system created by the Mamuju Regency Democratic Party was open recruitment by giving an agreement to all citizens to compete in the selection process. Assessment is carried out based on predetermined conditions, through objective and rational consideration. Every qualified person can perform competently in both political and administrative offices. So, every candidate for public office and cadre of the Democratic party is determined by the DPD of the Mamuju Regency Democratic party. **Conclusion:** The pattern of political recruitment at the Branch Leadership Council (DPC) of the Democratic Party of Mamuju Regency, West Sulawesi Province, in recruiting cadres and implementing internal party positions, is carried out through 3 (three) stages, namely: (a) Certification stages. The Mamuju Regency Democratic Party DPC focuses on recruiting cadres to register themselves as internal management candidates which is carried out in coordination with the Democratic Party DPAC in Mamuju Regency. Cadre screening is carried out openly, through the stages of administration and registration; (b) Stages of nomination. (c) Stages of selection. In the stage of selecting cadres who will be used as internal administrators, DPD takes an important role because the decision lies in the hands of the DPD Democratic Party of West Sulawesi Province.

Keywords: Political recruitment pattern, Democratic Party, Branch Leadership Council, Mamuju Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia merupakan suatu negara yang demokratis dan memiliki suatu gagasan politis yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat yaitu pemungutan suara. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam memilih sesuai dengan keinginan serta kehendak mereka untuk memilih pemimpin serta menentukan wakil mereka

dalam pemilihan legislatif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mamuju dalam pemilihan anggota pengurus serta kader partai, dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi dasar dalam menentukan rekrutmen politik. **Metode:** Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data penelitian. Data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan informan sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan KPU BAB V Tentang Keanggotaan dan Pendidikan politik partai Pasal 15 yaitu sistem kaderisasi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi kualitatif dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem rekrutmen yang diciptakan Partai Demokrat Kabupaten Mamuju adalah rekrutmen terbuka dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk bersaing dalam proses seleksi. Penilaian dilakukan berdasarkan syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan yang objektif dan rasional. Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan dalam melakukan kompetensi baik dalam jabatan politik maupun jabatan administrasi. Jadi setiap calon pejabat publik dan kader partai Demokrat ditentukan oleh DPD partai Demokrat Kabupaten Mamuju. **Kesimpulan:** Pola rekrutmen politik pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam perekrutan kader dan penerapan jabatan internal partai, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: (a) Tahapan sertifikasi. DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju fokus kepada penjangkaran kader untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengurus internal yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan DPAC Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Mamuju. Penjangkaran kader dilakukan secara terbuka, melalui tahapan administrasi dan pendaftaran; (b) Tahapan nominasi. (c) Tahapan pemilihan. Dalam tahapan pemilihan kader yang akan dijadikan sebagai pengurus internal, DPD mengambil peranan penting karena keputusan tersebut terletak di tangan DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci : Pola rekrutmen politik, Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang, Kabupaten Mamuju.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang demokratis dan memiliki suatu gagasan politis yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat yaitu pemungutan suara. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam memilih sesuai dengan keinginan serta kehendak mereka untuk memilih pemimpin serta menentukan wakil mereka dalam pemilihan legislatif. Sistem politik yang demokratis meletakkan kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat dalam urusan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004, dimana sebelumnya pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih melalui penunjukan langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dengan adanya pengaturan rekrutmen, maka dibuatlah suatu langkah kaderisasi. Sebab tanpa kaderisasi, tidak akan menghasilkan kader yang sesuai dengan target yang baik, setiap partai politik membutuhkan yang namanya regenerasi baru dalam peningkatan kemampuan untuk menjalankan partai politik. Adapun peningkatan kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan dalam mencari informasi, peningkatan keuangan, penjangkaran teknologi, dan skill kader partai politik. Proses rekrutmen politik merupakan suatu langkah penting yang berfungsi dalam keberlangsungan hidup setiap partai politik, diantaranya dalam pemilihan anggota melalui pengkaderan partai dan juga reproduksi yang bernilai positif bagi terciptanya

pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Salah satu tantangan setiap partai politik yaitu memperoleh sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi.

Dalam politik juga berbicara tentang sumber daya manusia. Karena partai politik tidak digerakkan oleh mesin atau teknologi. Kehadiran kader yang berpindah partai, hanya untuk mendapatkan status akan memberi kesan bahwa partai hanya digunakan untuk tawar menawar politik (Bargain Politics). Hal ini menunjukkan bahwa kader partai tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan ini akan mempengaruhi proses rekrutmen politik.

Partai Demokrat atau biasa disingkat PD adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini di dirikan pada 9 September 2001 dandisahkan pada 27 Agustus 2003. Pembentukan partai ini erat kaitannya dengan niat mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, yang pada periode Presiden Megawati telah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Selain pada pemilu 2019 sukses dalam mengantarkan perwakilannya dalam perebutan kursi, pada tahun 2022 partai demokrat juga sukses dalam memenangkan pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju. Partai Demokrat adalah partai yang besar dimana memiliki kader dan pengikut yang juga tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Karena itu Partai Demokrat sangat diharapkan bisa menjadi pelopor demokrasi yang mampu menjalankan serta melaksanakan tugas fungsi khususnya pada perekrutan politik di Kabupaten Mamuju.

Salah satu proses rekrutmen yang pernah terjadi dalam pola rekrutmen Partai Demokrat yaitu pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2010-2015, Partai Demokrat mengusung calon bupati yang latar belakangnya merupakan ketua DPD Partai Demokrat. Sedangkan calon wakil bupati yang memiliki latar belakang mantan aktivis LSM, dimana merupakan pendatang baru dalam dunia politik. Hal tersebut memperlihatkan dimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat ini begitu pragmatis. Dimana pola rekrutmen yang dilakukan tidak mengacu kepada ideologi partai demokrat yaitu Pancasila. Padahal ideologi merupakan sumber dari materi Pendidikan, program, dan pedoman dalam mengambil suatu kebijakan politik. Namun pasangan tersebut mempunyai elektabilitas yang tinggi sehingga mampu memenangkan pilkada tersebut.

Pemilihan kepala daerah tidak harus datang dari kader partai. Namun, fenomena masalah rekrutmen politik terlihat di dalam kegagalan event politik untuk mengantarkan kader politik untuk mengisi posisi publik dan mind-set event politik yang terlepas dalam memaksakan perangkat rekrutmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena rekrutmen politik yang telah dilakukan Partai Demokrat menunjukkan bahwa ada beberapa partai politik gagal menjalankan fungsi, tanggung jawab dan tugasnya dalam merekrut kader dan memutuskan calon pemimpin daerah.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa masalah yang telah disampaikan oleh penulis tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang **‘POLA REKRUTMEN POLITIK PADA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT’**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Pada tahun 2022 partai demokrat juga sukses dalam memenangkan pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju. Partai Demokrat adalah partai yang besar dimana memiliki kader dan pengikut yang juga tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Karena itu Partai Demokrat sangat diharapkan bisa menjadi pelopor demokrasi yang mampu menjalankan serta melaksanakan tugas fungsi khususnya pada perekrutan politik di Kabupaten Mamuju. Pada saat ini kekuatan serta eksistensi Partai Demokrat di Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan sangat bagus, dilihat dari kemenangan dan kedudukan kader-kader dari partai demokrat yang mampu menduduki kursi jabatan strategis

di provinsi Sulawesi Barat. Dr.H.Suhardi Duka,M.M. yang juga ketua DPD Partai Demokrat pernah menjabat sebagai bupati Kabupaten Mamuju periode 2005- 2010 dan pada periode selanjutnya berhasil menang dan mempertahankan kedudukannya sebagai bupati Kabupaten Mamuju tahun 2010-2015. Oleh karenanya dapat dilihat Partai Demokrat memiliki peran dan pengaruh cukup penting bagi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini sehingga membuat Partai Demokrat di Kabupaten Mamuju mengalami kemajuan yang signifikan dan menjadikan suatu penentu, karakteristik pemimpin partai mendominasi terhadap proses perekrutan kader-kader dilapangan. Hal itu terbukti dengan banyaknya masyarakat yang bergabung di Partai Demokrat. Pemimpin partai merupakan suatu simbol kesuksesan sebuah partai. Dapat dilihat dari eksistensi Partai Demokrat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Mamuju.Partai Demokrat dapat memenangkan persaingan-persaingan dalam memperoleh kursi jabatan penting. Proses rekrutmen politik Partai Demokrat diatur oleh undang-undang AD/ART Partai Demokrat dan peraturan bagi warga negara Indonesia untuk regenerasi anggota partai. Mekanisme tersebut dilakukan secara terbuka untuk menjadi anggota partai sekaligus menjadi wakil rakyat di legislatif dan eksekutif. Sebagaimana tertuang dalam kebijakan tersebut, Partai Demokrat memiliki persyaratan dalam proses rekrutmen politik. Namun dalam praktiknya, persyaratan ini belum sepenuhnya menjadi dasar perekrutan eksekutif. Padahal, mekanisme itu dibuat untuk memahami bahwa kader yang terpilih sebagai pengurus partai adalah kader yang berkualitas. Hal inilah yang mendorong penulis, untuk meneliti model rekrutmen politik Partai Demokrat, karena syarat untuk terpilih menjadi pemimpin atau untuk memperoleh jabatan politik atau jabatan partai harus melewati batas tertentu kerangka yang telah ditentukan yaitu dasar rekrutmen politik. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Mamuju yang akan diteliti sebaiknya menggunakan anggaran rumah tangga sebagai pedoman dalam melakukan rekrutmen. Namun, peraturan perundang-undangan anggaran rumah tangga Partai Demokrat hanya mengatur tentang kader ditempatkan di lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan Pasal 26 yaitu peraturan anggaran dasar. Mereka yang bukan pengurus partai dan anggota Partai Demokrat yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan eksekutif tidak tercakup dalam anggaran dasar dan peraturan. Oleh karena itu, hanya persyaratan kader yang telah lulus proses kaderisasi yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan Partai Demokrat..

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rex Tiran dan Syahrin B Kamahi dengan judul Rekrutmen politik partai Golkar di Kota Kupang tahun 2019, DPC Partai Golkar Kota Kupang memberikan dan menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk mengikuti proses seleksi. Evaluasi didasarkan pada suatu proses dengan kondisi yang telah ditentukan, melalui pertimbangan yang wajar dan objektif. Siapa pun yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing memperebutkan posisi politik dan administratif. Secara teoritis dikemukakan oleh Rush dan Althoff, prosedur rekrutmen DPC Partai Golkar Kota Kupang untuk mengidentifikasi calon peserta Pilkada Kota Kupang masih tertutup karena sistem kepengurusan di daerah(Tiran & Kamahi, 2021).

Kedua, penelitian yang oleh Steven J. Kaputeni dengan judul Fungsi parpol sebagai sarana rekrutmen politik (studi partai Nasdem Halmahera Utara dalam pelaksanaan Pilkada 2020). Hasil kajian menggambarkan bahwa dengan menerapkan rekrutmen politik pada pilkada 2020, partai Nasdem tidak memungut biaya atau mahar politik, yang merupakan terobosan dan gebrakan terbesar bagi partai-partai yang berasal dari kegagalan politik di Indonesia sesuai komitmennya. , yaitu Restorasi Indonesia. Sebelum tampil bertekad mendukung calon kepala daerah di Halmahera Utara, Partai Nasdem, DPD, melewati

beberapa tahapan dalam pemilihan calon kepala daerah di Halmahera Utara, yakni menyeleksi, menyeleksi, menyeleksi dan mengidentifikasi calon terpilih untuk dipindahkan ke DPW dan Partai Nasdem DPP (Kaputeni, 2020).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tarsan Asmara, Misran Safar, Samiruddin T dengan judul Pola Rekrutmen Politik (studi pada DPDII partai Golkar dalam menetapkan calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Muna). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen DPD II partai Golkar dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Muna cenderung dilakukan secara tertutup yaitu baik melalui cara koopsi. DPD II partai Golkar dalam proses seleksi calon legislatif membentuk koordinator calon legislatif di setiap dapil yang kemudian ditugaskan membantu merekrut kader-kader lain untuk menjadi calon legislatif di masing-masing dapilnya (Asmara et al., 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rekrutmen politik menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat adanya kesenjangan dalam penelitian rekrutmen politik. Penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas bagaimana politik merekrut calon kepala daerah dan calon wakil rakyat. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitiannya pada model rekrutmen politik intra- partai untuk kandidat partai dan jabatan publik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pola rekrutmen politik pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam perekrutan kader dan penetapan jabatan internal partai. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penentu dalam pola rekrutmen politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Peneliti telah memilih metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif adalah suatu penilaian yang menggambarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan berdasarkan fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan dianalisis serta memecahkan persoalan yang bersifat umum (John W. Cresswell, 2016). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Rekrutmen Politik dengan dimensi Sertifikasi, Penominasian, Pemilihan.

. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu (Anggito & Setiawan, n.d.). Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer (Anggito & Setiawan, n.d.). Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi (John W. Cresswell, 2016). Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Huberman & Miles, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola Rekrutmen Politik Pemilihan Kader dalam Jabatan Partai DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju

DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju telah menjalankan fungsinya sebagai partai politik dengan melaksanakan rekrutmen politik. Dalam proses rekrutmen, untuk menempatkan kader dalam posisi struktural internal partai, dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku pada AD/ART partai dan peraturan perundang-undangan. Proses rekrutmen DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju secara langsung melibatkan DPAC

Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Mamuju. Pelibatan langsung tersebut dilakukan dengan tujuan agar DPAC Partai Demokrat dapat dengan langsung mengusulkan calon kader yang ingin menjadi pengurus dalam struktur organisasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju. Proses rekrutmen juga dilakukan dengan pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan internal dilakukan dengan cara menjangking bakal calon pengurus partai yang berasal dari kader DPAC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju. Sementara pendekatan eksternal dilakukan dengan cara penjarangan bakal calon pengurus partai yang berasal dari non kader DPAC Partai Demokrat dengan mempertimbangkan elektabilitas dan kemampuan seseorang.

Setelah melaksanakan proses rekrutmen politik, DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju kembali mengkaji bakal calon kader yang telah terdaftar melalui DPAC Partai Demokrat dengan menimbang segi desentralis. Kemudian, proses keputusan kader yang akan menjadi pengurus partai ditetapkan dengan mempertimbangkan saran dan analisis dari pihak DPP Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Analisis tersebut dilakukan dengan menimbang karakter kader, elektabilitas kader serta kemauan dan kemampuan untuk menaati kebijakan partai. Pengkajian bakal calon kader pengurus partai dapat diidentifikasi dan dianalisis melalui 3 (tiga) tahapan dalam teori rekrutmen politik yang dituturkan oleh Pippa Norris, yaitu:

a. Sertifikasi

Tahapan sertifikasi yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju dibuka untuk umum, hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu – selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju, bahwa:

“Proses rekrutmen di Partai Demokrat tidak berdasarkan nepotisme dan kedekatan keluarga dan bersifat umum, artinya semua masyarakat boleh mendaftar, yang jelasnya masyarakat yang mendaftar itu, harus nasionalis dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila”.

Dengan proses rekrutmen yang terbuka untuk umum, dapat membuka peluang dari berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda untuk bergabung ke dalam kepengurusan partai ataupun mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan calon anggota legislatif. Namun, yang harus diperhatikan adalah elektabilitas kader yang dapat menunjang peningkatan perolehan suara Partai Demokrat. Dengan tahapan sertifikasi yang dilakukan secara terbuka, akan memudahkan partai untuk memilih kader-kader yang berkualitas melalui tahapan.

Dalam tahapan sertifikasi ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju memiliki kriteria tertentu dalam memilih kader dan non kader yang calon pengurus internal partai. Hal tersebut sesuai dengan dimensi sertifikasi yang terdapat dalam teori rekrutmen politik oleh Pippa Norris, bahwa dalam proses rekrutmen politik, partai politik biasanya memberikan kriteria tertentu untuk memperoleh kader yang berkualitas.

b. Nominasi

Aspek-aspek tersebut yang kemudian menjadi bahan penilaian oleh elit DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju dalam menetapkan kader yang akan mengisi jabatan dalam internal partai. Sejalan dengan itu informan menjelaskan bahwa: “Dalam tahapan penetapan kader yang bisa dijadikan pengurus internal partai, kami biasanya mempertimbangkan rekam jejaknya, untuk melihat apakah dia pernah melakukan sesuatu yang dapat merusak nama baik partai, kami juga lihat aspek jabatan apa yang pernah dia duduki, dan masih banyak lainnya”. Pengisian jabatan internal partai diprioritaskan untuk kader partai serta keterwakilan

perempuan, lalu kemudian untuk non kader. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak – sebagai – yang mengatakan, bahwa:

“Tentunya kami dahulukan dulu kader yang sudah lebih dahulu berkecimpung di partai, yang sudah mengikuti berbagai jenis program yang kita laksanakan. Kami juga dahulukan keterwakilan perempuan, karena itu amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkhusus untuk non kader, kami lebih baik arahkan untuk mengikuti kaderisasi terlebih dahulu agar mereka memahami dengan baik ideologi partai. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa saja langsung jadi pengurus partai toh, apalagi kalau elektabilitasnya bagus, baru banyak prestasinya juga”.

Dimensi nominasi yang dicetuskan oleh Pippa Noris juga melihat apakah pola kekuasaan dalam internal partai, sangat mempengaruhi tahapan penetapan kader sebagai pengurus internal ataupun calon kepala daerah dan calon anggota legislatif. Tahapan penetapan tersebut, dapat melalui 2 (dua) cara yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

Sentralisasi dalam konteks penetapan kader sebagai pengurus internal partai, dimaksudkan bahwa dalam penetapan dipengaruhi secara langsung oleh pimpinan partai, yaitu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju. Sedangkan desentralisasi dimaknai sebagai proses penetapan yang dipengaruhi oleh pendelegasian. Menyikapi hal tersebut, hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut:

“Kami disini cuma penyaring kader-kader yang memang berpotensi. Proses penetapan dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat melalui usulan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju. Karena dengan adanya kader-kader yang ada dalam lingkup DPC juga akan mempengaruhi DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat, terkhususnya untuk calon kepala daerah dan calon anggota legislatif, yang harus dikordinasikan dengan baik. Kalau kader partai yang ditingkat Kabupaten, sudah pasti juga kader di tingkat Provinsi akan lebih baik”.

c. Pemilihan

Dalam pengambilan keputusan ini, DPD juga mengambil peranan penting karena keputusan tersebut terletak di tangan DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju diputuskan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat, bukan ditangan internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju. Berdasarkan informasi berikut:

“Memang untuk kepengurusan disini diputuskan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat, yang mempertimbangkan elektabilitas kader yang akan jadi pengurus internal. Dari sana juga mereka di DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat lakukan survey terlebih dahulu, siapa-siapa saja yang bisa dijadikan pengurus, karena yang akan dikelolakan partai politik, jadi pemilihan kader harus benar-benar dipertimbangkan, harus dipilih yang terbaik”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, proses pemilihan pengurus internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju bersifat sentralis pada DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat, dengan keterlibatan DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju hanya pada saat tahapan penyaringan.

Tabel 3.1 Kepengurusan DPC Partai Demkrat Se- Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Jabatan	Nama
1	Mamasa	Ketua	Frans, S.Pd., M.H.
		Sekretaris	Soleman Pualillin, S.H.
		Bendahara	Taufik Sp.
2	Polewali Mandar	Ketua	Syamsul Samad, S.IP., M.Si.
		Sekretaris	Hery Irwanto Rusli, S.H.I
		Bendahara	Ikbal
3	Majene	Ketua	H. A. Achmad Syukri, S.E., M.M.
		Sekretaris	M. Idwar
		Bendahara	Bayu Aditya Pratama
4	Mamuju	Ketua	Hj. Sitti Suraidah S, S.E., M.Si.
		Sekretaris	Yuslifar Yunus Jafar
		Bendahara	Ramliati S. M.
5	Pasangkayu	Ketua	Musawir Azisham, S.H., M.Si.
		Sekretaris	Ishak Ibrahim, S.H.
		Bendahara	Desi Wahyuni
6	Mamuju Tengah	Ketua	H. Arsal Aras, S.E, M,Si
		Sekretaris	Hamka, S.Pd.I.
		Bendahara	Kiswan

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Barat

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing pengurus internal DPC Partai Demokrat terdiri dari kader yang mempunyai berbagai latar belakang, baik dari aspek pendidikan, elektabilitas maupun kepemimpinan. Dengan begitu, data tersebut dapat membuktikan bahwa pemilihan pengurus DPC Partai Demokrat sangat dipengaruhi oleh penetapan keputusan DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan aspek ketokohan, finansial dan kepatuhan. Sehingga mekanisme penetapan dan pemilihan rekrutmen politik kader calon pengurus internal partai dalam internal DPC Partai Demokrat 77 Kabupaten Mamuju bersifat sentralis, namun tetap bersifat terbuka untuk umum.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mendominasi Dalam Proses Rekrutmen Politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju

a. Anggota Partai

Anggota partai terbagi menjadi 2 (dua) yaitu anggota biasa dan kader. Anggota merupakan individu yang tidak berada dalam struktur internal partai politik, tetapi menganut ideologi partai, yang kemudian akan menjadi kader. Sementara, kader merupakan individu yang memiliki loyalitas, kapasitas serta dedikasi terhadap partai politik dengan tujuan agar individu tersebut dapat mengisi jabatan struktur kepengurusan internal partai serta mengembangkan dan memperjuangkan ideologi partai.

Pengertian di atas, sesuai dengan penjelasan dari Bapak – sebagai -, yang mengatakan bahwa:

“Bedanya anggota partai dengan kader itu, misalkan kalau anggota partai cukup memiliki KTA, tapi dia masih perlu disiapkan jadi pengurus partai, makanya anggota itu harus ikut dulu kaderisasi, nanti disana dibibit jadi kader. Kalau kader itu, memang sudah ikut kaderisasi, selanjutnya disiapkan sebaik mungkin, supaya dia bisa jadi pengurus partai”.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa keanggotaan Partai Demokrat yang tercatat dalam proses verifikasi partai peserta pemilihan umum tahun 2024, berjumlah 2.388 orang dengan rincian data, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Keanggotaan DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota
1	Majene	335
2	Mamasa	306
3	Mamuju	559
4	Mamuju Tengah	225
5	Pasangkayu	249
6	Polewali Mandar	694
Jumlah Total		2.388

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Barat, 2023.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah keanggotaan terbanyak berada pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Polewali Mandar, dengan jumlah 694 orang. Kemudian disusul oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju dengan jumlah anggota sebanyak 550 orang. Sementara, jumlah keanggotaan paling sedikit berada pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah 225 orang. Dengan demikian, persentase angka jumlah anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju mencapai 23,4% dari total keseluruhan anggota Partai Demokrat yang ada di Sulawesi Barat.

Setelah melakukan perekrutan anggota baru, DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju mendahulukan pendidikan politik bagi seluruh anggota baru yang bergabung, sebagai pemenuhan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Tujuan DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju menggunakan cara compartmentalization dalam proses rekrutmen anggota baru agar anggota-anggota yang telah direkrut mampu memperkuat daya saing dengan partai-partai politik lainnya dalam pemilihan umum. Peneliti juga menganalisis bahwa proses rekrutmen anggota baru melalui cara civil service reform akan sangat menguntungkan anggota baru yang mempunyai kedekatan dengan elit partai politik, dengan bermodalkan kompetensi dan loyalitasnya, sehingga akan sangat mudah bagi anggota baru tersebut menempatkan dirinya pada posisi jabatan struktural internal partai.

b. Kader Partai

Dalam perkembangannya, partai politik pada saat ini telah membuka peluang bagi non kader untuk menjadi pengurus internal partai. Hal tersebut, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa masih didapati seorang kader yang belum dapat mempertahankan serta memperjuangkan visi dan misi partai politik. Sehingga strategi yang ditempuh untuk menyikapi hal tersebut dengan cara memberikan peluang tersebut kepada non kader. Demikian halnya dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju yang juga membuka peluang bagi non kader untuk menjadi pengurus internal, dengan syarat bahwa non kader tersebut mampu berkontribusi lebih kepada partai politik dengan cara meningkatkan kualitas dan citra partai politik. Penjelasan ini, sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak – selaku -, bahwasanya:

“Tidak menutup kemungkinan kami memberikan peluang bagi non kader untuk menjadi pengurus internal. Karena apabila kemampuan non kader tersebut melebihi kemampuan kader untuk meningkatkan kualitas dan citra positif partai, apa salahnya. Apalagi itu dianggap sebagai keuntungan untuk partai. Hanya saja, akan jauh lebih baik ketika non kader tersebut mengikuti kaderisasi. Supaya dia bisa memahami dengan baik visi dan misi partai yang akan dipegang”.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan, ketika ingin menempatkan non kader sebagai pengurus internal partai politik, yaitu: (a) Elektabilitas; (b) Tidak sekedar mengandalkan

kemampuan finansial. Sehubungan dengan aspek tersebut, Bapak – sebagai – menuturkan bahwa:

“Non kader yang mau jadi pengurus partai itu tidak ada salahnya, karena memang tidak ada batasan untuk itu. Tapi, yang harus diingat bahwa non kader harus punya popularitas (elektabilitas), supaya bisa mengangkat suara partai. Non kader juga harus berasumsi bahwa partai politik ini, bukan ladang untuk mencari untung (uang) karena bisa merusak nama baik partai dan kepercayaan masyarakat”.

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa elektabilitas merupakan modal utama untuk memudahkan kader ataupun non kader dalam mencalonkan dirinya sebagai pengurus internal partai. Tetapi, elektabilitas yang dimiliki, tidak akan menjamin kualitas. Karena elektabilitas tanpa kemampuan berpolitik, hanya akan merusak visi dan misi partai. Disamping itu, memang elektabilitas juga dapat menguntungkan partai politik karena akan menghemat biaya kampanye.

c. Pengurus Partai

Dominansi pengurus partai dalam proses rekrutmen politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari campur tangan para pengurus partai sebelumnya dalam mengusulkan nama kader yang akan menjadi pengurus internal selanjutnya. Artinya, pengurus berupaya semaksimal mungkin untuk menempatkan kader potensial dalam posisi kepengurusan struktural internal. Upaya tersebut dilakukan agar sirkulasi tonggak kepengurusan berjalan dengan baik serta sesuai dengan arah visi dan misi Partai Demokrat. Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abd.Wahab Abdy,S.Sos,MAP selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat terkait dengan keterlibatan pengurus sebelumnya dalam pengusulan kader calon pengurus internal, bahwa:

“DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju itu kan cuma mengusulkan nama-nama kader saja yang bisa dijadikan sebagai pengurus internal, tapi yang menentukan itu dari pihak DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Kalau begitu, kami cuma bisa mengawal sampai tahap pengusulan saja, nanti kader yang diusul itu, baru bisa ditetapkan kalau sudah lolos seleksi. Pasti juga pengurus partai yang sebelumnya, kalau mau diganti pasti akan mencari kader yang memang punya kompetensi untuk jalankan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Partai Demokrat”.

Dari penjelasan tersebut, peneliti menganalisis bahwa dominansi pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju dalam proses rekrutmen politik terletak pada pengusulan nama-nama kader calon pengurus internal. Disisi lain, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Abd.Wahab Abdy,S.Sos,MAP selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat terkait dengan metode yang dilakukan pengurus lama dalam mempertahankan kadernya sebagai calon pengurus internal, bahwa:

“Sejauh pengalaman saya, mau tidak mau pasti kader yang mau dijadikan pengurus internal itu, selalu mempunyai kedekatankedekatan tertentu dengan pengurus sebelumnya. Kalau memang tidak dekat, pasti karna kader itu punya nilai lebih dari pada kaderkader yang lain seperti pintar berpolitik kah atau yang lainnya. Mau dibilang salah, yah tidak juga karena belum ada aturan yang mengikat, karna logikanya pasti kita mau orang yang mengisi jabatan kita lebih baik dari kita dan bisa diarahkan”.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang penulis laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rex Tiran dan Syahrin B Kamahi dengan judul Rekrutmen politik partai Golkar di Kota Kupang tahun 2019, DPC Partai Golkar Kota Kupang memberikan dan menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk mengikuti proses seleksi. Terletak pada Dalam perkembangannya, partai politik pada saat ini telah membuka peluang bagi non kader untuk menjadi pengurus internal partai. Hal tersebut, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa masih didapati seorang kader yang belum dapat mempertahankan serta memperjuangkan visi dan misi partai politik. Sehingga strategi yang ditempuh untuk menyikapi hal tersebut dengan cara memberikan peluang tersebut kepada non kader. Demikian halnya dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju yang juga membuka peluang bagi non kader untuk menjadi pengurus internal, dengan syarat bahwa non kader tersebut mampu berkontribusi lebih kepada partai politik dengan cara meningkatkan kualitas dan citra partai politik

Kedua, penelitian yang oleh Steven J. Kaputeni dengan judul Fungsi parpol sebagai sarana rekrutmen politik (studi partai Nasdem Halmahera Utara dalam pelaksanaan Pilkada 2020). Terletak pada Dominansi pengurus partai dalam proses rekrutmen politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari campur tangan para pengurus partai sebelumnya dalam mengusulkan nama kader yang akan menjadi pengurus internal selanjutnya. Artinya, pengurus berupaya semaksimal mungkin untuk menempatkan kader potensial dalam posisi kepengurusan struktural internal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tarsan Asmara, Misran Safar, Samiruddin T dengan judul Pola Rekrutmen Politik (studi pada DPDII partai golkar dalam menetapkan calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Muna). Terletak pada Dengan proses rekrutmen yang terbuka untuk umum, dapat membuka peluang dari berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda untuk bergabung ke dalam kepengurusan partai ataupun mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan calon anggota legislatif. Namun, yang harus diperhatikan adalah elektabilitas kader yang dapat menunjang peningkatan perolehan suara Partai Demokrat. Dengan tahapan sertifikasi yang dilakukan secara terbuka, akan memudahkan partai untuk memilih kader-kader yang berkualitas melalui tahapan.

IV. KESIMPULAN

Pentingnya peran rekrutmen politik dalam menentukan kader yang akan mengisi jabatan kepengurusan internal partai, dipengaruhi oleh faktor-faktor dominan yang akan menjadikan proses rekrutmen politik akan berjalan dengan ketat dan berkualitas, ketika dibarengi oleh euforia peminat yang tinggi. Hasil analisa penulis lakukan terkait dengan pola rekrutmen politik pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, menyimpulkan bahwa:

1. Pola rekrutmen politik pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam perekrutan kader dan penerapan jabatan internal partai, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: (a) Tahapan sertifikasi. DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju fokus kepada penjangkaran kader untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengurus internal yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan DPAC Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Mamuju. Penjangkaran kader dilakukan secara terbuka, melalui tahapan administrasi dan pendaftaran; (b) Tahapan nominasi. Fokus kepada penentuan kader yang akan diusulkan menjadi pengurus internal. Dalam tahapan penentuan kader sebagai pengurus internal partai, dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu pengabdian kepada partai, pendidikan, pengalaman jabatan, kompetensi, elektabilitas dan prestasi serta konduite. Bentuk pola kekuasaan DPC Partai Demokrat yang mempengaruhi tahapan nominasi adalah sentralisasi, karena DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju hanya sebatas menyaring dan mengusulkan kepada DPD Partai Demokrat Provinsi

Sulawesi Barat; (c) Tahapan pemilihan. Dalam tahapan pemilihan kader yang akan dijadikan sebagai pengurus internal, DPD mengambil peranan penting karena keputusan tersebut terletak di tangan DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju diputuskan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat, bukan ditangan internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju.

2. Faktor-faktor yang mendominasi dalam pola rekrutmen politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yaitu: (a) Anggota Partai. Dalam merekrut anggota baru, DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju melakukannya dengan menggunakan cara compartmentalization, yaitu proses rekrutmen yang mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman keorganisasian calon anggota partai. proses rekrutmen anggota baru juga dilakukan melalui cara civil service reform akan sangat menguntungkan anggota baru yang mempunyai kedekatan dengan elit partai politik, dengan bermodalkan kompetensi dan loyalitasnya, sehingga akan sangat mudah bagi anggota baru tersebut menempatkan dirinya pada posisi jabatan struktural internal partai; (b) Kader Partai. Proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju di buka bagi kader dan non kader. Namun, ketika DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju menempatkan non kader sebagai pengurus internal partai politik, sangat memperhatikan tingkat elektabilitas serta tidak sekedar mengandalkan kemampuan finansial. (c) Pengurus Partai. Dominansi pengurus partai dalam proses rekrutmen politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari campur tangan para pengurus partai sebelumnya dalam mengusulkan nama kader yang akan menjadi pengurus internal selanjutnya. Artinya, pengurus berupaya semaksimal mungkin untuk menempatkan kader potensial dalam posisi kepengurusan struktural internal. Upaya tersebut dilakukan agar sirkulasi tonggak kepengurusan berjalan dengan baik serta sesuai dengan arah visi dan misi Partai Demokrat..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (n.d.). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Asmara, T., Safar, M., & T, S. (2019). *Pola Rekrutmen Politik (studi pada DPDII partai golkar dalam menetapkan calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Muna)*.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*.
- John W. Cresswell. (2016). *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantutatif, Dan Mixed, Edisi Ketiga*. Pustaka Pelajar.
- Kaputeni, S. J. (2020). *Fungsi parpol sebagai sarana rekrutmen politik (studi partai Nasdem Halmahera Utara dalam pelaksanaan Pilkada 2020)*.
- Tiran, R., & Kamahi, S. B. (2021). *Rekrutmen politik partai Golkar di Kota Kupang tahun 2019, DPC Partai Golkar Kota Kupang*.

